

### **BAB III**

## **KONFLIK OSSETIA SELATAN**

Setiap negara di dunia memiliki perbatasan berdasarkan ragam kriteria. Namun, batas politik suatu negaralah yang paling sering memicu perdebatan. Beberapa kasus bahkan menyulut pecahnya konflik bersenjata antara dua negara yang masih terus berlangsung hingga kini<sup>54</sup>. Salah satunya apa yang terjadi di Georgia dimana dua wilayah di negara ini tengah ingin melepaskan diri dan menjadi negara berdaulat, yakni Ossetia Selatan dan Abkhazia. Namun pada bab ini penulis hanya menyinggung Ossetia Selatan saja.

Ossetia Selatan merupakan salah satu negara Republik yang terbentuk setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Paska runtuhnya Uni Soviet, memang banyak negara-negara yang memerdekakan diri, salah satunya Ossetia Selatan ini. Negara ini terletak di antara perbatasan Rusia dengan Georgia. Kedaulatan negara ini memang masih dipertanyakan, karena Georgia mengklaim bahwa wilayah ini termasuk dalam bagian wilayahnya. Akan tetapi klaim ini tidak diakui oleh dunia Internasional. Penduduk Ossetia Selatan mayoritas merupakan etnis Rusia.

Pada bab ini penulis akan menerangkan secara luas bagaimana konflik yang terjadi di wilayah ini mulai dari dinamika hingga paska konflik berakhir. Dengan diawali gambaran sekilas mengenai Ossetia Selatan sebagai pembuka.

#### **A. Gambaran Umum Ossetia Selatan**

Orang-orang Ossetia diyakini sebagai keturunan suku-suku yang bermigrasi ke suatu daerah dari Asia ratusan tahun lalu dan menetap di sebuah wilayah yang saat ini merupakan wilayah Ossetia Utara. Kekaisaran Rusia melakukan ekspansi dan memperluas wilayahnya hingga ke daerah tersebut pada abad 18 dan abad 19. Secara tradisi, orang-orang Ossetia memiliki hubungan yang baik dengan Rusia dan dianggap sebagai warga negara yang setia, mulai dari masa kekaisaran hingga masa berdirinya Uni Soviet. Mereka berpihak pada Kremlin ketika pasukan Bolshevik menduduki Georgia pada awal tahun 1920an. Paska kejadian tersebut, Rusia membagi wilayah tersebut menjadi dua yakni wilayah Ossetia Selatan menjadi bagian Georgia dan Ossetia Utara masuk menjadi bagian dari Federasi Rusia<sup>55</sup>. Georgia menyebut wilayah ini dengan nama Samachablo.

Wilayah Ossetia Selatan berada di kawasan Kaukasus dan terletak di antara perbatasan Rusia dengan Georgia. Tskhinvali merupakan ibu kota Ossetia Selatan dan Rubel sebagai mata uang resminya. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Ossetia, Rusia dan Georgia.

Secara Geografis, Luas wilayah Ossetia Selatan hanya 3,900 km<sup>2</sup>. Wilayah Ossetia Selatan dipisahkan oleh sebuah gunung sebagai penanda batas dengan wilayah Ossetia Utara (bagian dari Federasi Rusia). Wilayah Ossetia Selatan didominasi oleh gunung-gunung yang membentang seluas 1000 m. Gunung Khalatsa merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.938 m diatas permukaan laut<sup>56</sup>.

Dari segi perekonomian, bidang pertanian merupakan sektor utama meski 10% wilayah ini dibudidayakan. Pinus, sereal dan buah-buahan merupakan hasil utamanya.

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/3797729.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3797729.stm) diakses tanggal 12 Oktober 2011  
*South Ossetia* dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/South\\_Ossetia](http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia) diakses tanggal 13 Oktober 2011

Industri peternakan dan kehutanan juga sedang ditingkatkan. Sejumlah fasilitas industri masih tetap ada, khususnya di ibukota Tskhinvali. Sebelum konflik di wilayah ini meletus tahun 2008, industri di Ossetia Selatan terdiri dari dua puluh dua pabrik kecil, dengan total produksi mencapai 61,6 juta rubel pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007, hanya ada tujuh yang berfungsi. Di laporkan bahwa sebagian besar produksi pabrik menganggur dan membutuhkan perbaikan. Bahkan pabrik yang sukses pun masih kekurangan pekerja dan berada dalam hutang. Pabrik Emalprovod merupakan pabrik tersukses dengan hanya memiliki 130 pekerja.

Pihak berwenang Ossetia Selatan berencana untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan produksi tepung lokal dan mengurangi kebutuhan tepung impor. Untuk mewujudkan rencana ini, pada tahun 2008 area yang ditanami gandum meningkat sepuluh kali lipat dari 130 hektar sampai 1.500 hektar dan diharapkan Panen gandum menghasilkan 2.500 ton biji-bijian. Kementrian pertanian juga mengimpor traktor dan mengharapkan pengiriman mesin pertanian yang lebih pada tahun 2009. Rusia berencana menghabiskan dana 10 miliar rubel demi restorasi Ossetia Selatan pada tahun 2009. Ekonomi di Ossetia Selatan berkembang pesat berkat kehadiran pasukan militer Rusia<sup>57</sup>.

Secara demografis, populasi penduduk di wilayah Ossetia Selatan mencapai 70.000 orang. Mencakup etnis Ossetia (67,1%), Georgia (25,0%), Rusia (3%), Armenia (1,3%), Yahudi (0,9%) dan lainnya (2,6%). Human Right Watch menyatakan, perkiraan populasi penduduk di wilayah ini pada tahun 2009 hanya tinggal 54.500 orang. Hal ini disebabkan karena 15.000 etnis Georgia melarikan diri dan 500 warga tewas<sup>58</sup>.

*Ibid*  
*Ibid*

## **B. Dinamika Konflik Ossetia Selatan**

Sejarah antara Georgia dan Ossetia Selatan menunjukkan bahwa agresi militer yang tidak manusiawi dari pihak Georgia pada bulan Agustus 2008 memiliki dasar sejarah yang mendalam. Gejolak konflik yang terjadi di wilayah Ossetia Selatan tidak hanya berkobar pada tahun 2008 saja, sebelumnya pada tahun 1991-1992 dan 1918-1920 meletus konflik yang sama meski penyebab konflik di dua kejadian sebelumnya hampir mirip.

### **B.1. Konflik Tahun 1918-1920**

Konflik yang terjadi pada tahun 1918-1920 merupakan serangkaian pemberontakan yang terjadi di Ossetia, sebuah wilayah yang saat ini merupakan wilayah Ossetia Selatan yang kini berusaha melepaskan diri dari Georgia, melawan Republik Federatif Demokratik Transkaukasus dan Republik Demokratik Georgia. Penyebab konflik ini rumit, mulai dari reformasi lahan yang terlambat sampai dengan adanya gangguan pertanian<sup>9</sup>.

Pada 26 Mei 1918, Republik Demokratik Georgia menyatakan diri lepas dari Rusia. Akibatnya secara legal formal, Ossetia Selatan terpisah dengan saudara-saudara mereka yang berada di Ossetia Utara. Rakyat Ossetia Selatan menyuarakan keinginannya untuk melepaskan diri dari Georgia dan bergabung dengan Ossetia utara karena merasa

<sup>9</sup> International Crisis Group, *Georgia: Avoiding war in South Ossetia* (Europe Report No.159) Tblisi/Brussels, ICG, 14 November 2004 dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan019224.pdf> diakses tanggal 17 Oktober 2011

diperlakukan secara diskriminatif. Keinginan rakyat Ossetia Selatan itu ditafsirkan oleh Georgia sebagai dukungan terhadap kelompok Bolshevik<sup>60</sup>.

Perasaan saling curiga diantara kedua belah pihak seketika berubah menjadi insiden-insiden yang melawan pemerintah. Puncaknya pada tahun 1920 rakyat Ossetia Selatan yang didukung oleh kaum Bolshevik dari Ossetia Utara melakukan pemberontakan besar. Namun, pemberontakan tersebut dapat ditumpas secara brutal oleh tentara pemerintah Georgia<sup>61</sup>. Insiden ini telah menciptakan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara Georgia dengan Ossetia Selatan dan tidak mengherankan jika gejala permusuhan diantara keduanya berlanjut pada dekade 90an yakni tahun 1991-1992 dan awal abad 21 (tahun 2008).

Kemerdekaan yang dirasakan oleh Georgia tidak berlangsung lama. Pada bulan Februari tahun 1921, kaum Bolshevik berhasil merebut Georgia dari tangan kaum Menshevik. Dalam perjanjian Uni yang menjadi dasar dari pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922, Ossetia Selatan mendapatkan status sebagai Autonomous Oblast (wilayah otonom) namun masih berada di bawah kendali pemerintahan Georgia. Rakyat Ossetia Selatan menolak status tersebut dan menginginkan status yang sama dengan saudara-saudara mereka yang berada di Ossetia Utara yang mendapatkan status lebih tinggi yakni Autonomous Republic (Republik Otonom).

Sementara itu, menurut rakyat Georgia, Ossetia Selatan hanyalah merupakan entitas asing yang pembentukannya tidak lain ialah implementasi politik pecah belah (*divide et*

impera) yang dilakukan oleh Rusia<sup>62</sup>. Meski demikian, hubungan Georgia dengan Ossetia Selatan tidak mengalami gangguan yang berarti ketika melewati masa-masa diktator Stalin, Presiden Krushnev dan Presiden Brezhnev.

## **B.2. Konflik Tahun 1991-1992**

Setelah Rezim Tsar mengalami kejatuhan, warga Ossetia Selatan beraliansi dengan kaum Bolsheviks berperang melawan pemerintahan Menshevik Georgia yang baru saja merdeka. Pemerintahan Menshevik Georgia sukses dalam perang tersebut dengan meraih kemenangan. Namun pada tahun 1921, Tentara Merah menakhlukan Georgia, sementara Ossetia Selatan dijadikan sebagai provinsi otonom di wilayah Republik Soviet Georgia. Selama masa Soviet, hubungan antara warga Ossetia Selatan dengan Georgia sangatlah damai dengan interaksi yang baik dan pernikahan antar etnis.

Tahun 1989, ada sekitar 98.000 orang yang tinggal di Ossetia Selatan dimana 66,62% merupakan etnis Ossetia dan 29,44% merupakan etnis Georgia. 99.000 etnis Ossetia lainnya tinggal di wilayah Georgia. Diakhir tahun 1991, paska runtuhnya Uni Soviet, Georgia kembali menjadi negara yang merdeka dibawah kepemimpinan Zviad Gamshakurdia. Sementara agenda utamanya diarahkan pada kebijakan Soviet, tindakannya sering mengorbankan kelompok minoritas di Georgia. Di waktu yang sama, Ossetia Selatan memutuskan untuk menaikkan status wilayah mereka dari provinsi Otonom menjadi Republik Otonom. Tindakan yang dilakukan oleh Ossetia Selatan tersebut dinilai sebagai pergerakan yang illegal.

Pada 23 November 1989, Gamshakurdia menggelar aksi demonstrasi ke Tskhinvalli, ibu kota Ossetia Selatan. Warga Ossetia Selatan melakukan pencegahan dengan memblokir jalan. Bentrokan pun pecah dan melibatkan beberapa orang

terluka. Pada bulan-bulan berikutnya, warga Ossetia Selatan mulai mempersenjatai diri. Gamshakurdia memenangkan pemilu dewan tertinggi Georgia 1990, tetapi warga Ossetia Selatan melakukan pemboikotan atas hal ini.

Pada tanggal 6 Januari 1991, Pasukan Georgia memasuki wilayah Ossetia Selatan setelah sebelumnya menduduki ibu kota Tskhinvalli. Kota ini diserahkan kepada 6000 militan Georgia. Setelah menduduki semua infrastruktur penopang kehidupan, memblokir jalan, memutus aliran listrik dan menghancurkan jaringan pipa, para militan ini mulai melakukan pembunuhan terhadap warga Ossetia Selatan. Sehari kemudian pada tanggal 7 Januari yang dikenal oleh warga Tskhinvalli sebagai Natal berdarah. Di kota-kota lainnya, "polisi" Georgia menembaki orang-orang yang tidak bersenjata dan mengakibatkan beberapa orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Tindakan teror yang terorganisir di Ossetia Selatan berakhir dengan pembantaian warga sipil, penjarahan dan pembakaran masyarakat Ossetia. organisasi militan Georgia "Mhedrioni" bertindak dengan kekejaman tertentu<sup>63</sup>. Pada 28 November 1991, Ossetia Selatan menyatakan kemerdekaannya dari Georgia secara sepihak, namun tidak mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Hal ini dibuktikan dengan tidak dimasukkannya Ossetia Selatan sebagai negara merdeka dalam forum PBB oleh NATO-AS.

Pada musim semi tahun 1992 tepatnya pada bulan April dan Mei, eskalasi konflik kembali terjadi dengan keterlibatan Rusia yang sporadis. Politisi garis keras seperti pemimpin Parlemen Rusia Ruslan Khasbulatov dan Wakil Presiden Aleksander Rutskoi mengeluarkan pernyataan yang berisikan kecaman keras terhadap tindakan dan penerimaan secara implisit mengenai keinginan Ossetia Selatan untuk bergabung dengan

---

*South Ossetia and Georgia: Historic Roots of Conflict* dari <http://rt.com/politics/south-ossetia-and-georgia-historic-roots-of-the-conflict/> diakses tanggal 13 Oktober 2011

Rusia.<sup>64</sup> Memasuki bulan Juni, baik Rusia maupun Georgia telah berada dalam ambang peperangan. Helikopter-helikopter Rusia melancarkan serangan terhadap tank dan ranpur milik tentara Garda Nasional Georgia sementara satuan-satuan militer Rusia dan relawan-relawan dari Kaukasus Rusia berhimpun di Ossetia Utara. Ossetia Utara juga ikut memberikan dukungan kepada saudara-saudara mereka yang berada di Ossetia Selatan dengan memotong suplai gas alam dari Rusia ke Georgia dan melakukan lobi dengan Moskow agar segera menggelar pasukan yang telah terhimpun<sup>65</sup>. Meski demikian, pada bulan Maret tahun 1992, Gamshakurdia diusir dan digantikan oleh Eduard Shevarnadze. Setelah itu, pihak-pihak yang setia dengan Gamshakurdia melancarkan pemberontakan bersenjata. Lebih jauh lagi terjadi eskalasi konflik yang lebih besar di wilayah separatis Abkhazia di tahun yang sama. Pada akhirnya, Eduard Shevarnadze mengakhiri konflik yang terjadi dan segera menandatangani perjanjian Sochi dengan Rusia .

Perjanjian Sochi diadakan tanggal 24 Juni 1992. Dalam perjanjian ini tidak hanya di hadiri oleh Rusia dan Georgia saja (dalam hal ini Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Presiden Georgia Eduard Shevarnadze), pihak dari Ossetia Utara dan Ossetia Selatan turut menghadiri perjanjian tersebut. Isi perjanjian gencatan senjata pada prinsipnya untuk membekukan konflik yang selama ini terjadi. Selain itu perjanjian gencatan senjata juga menghasilkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian (JPFK) yang terdiri dari personel tentara Rusia, Georgia dan Ossetia baik Ossetia Utara maupun Ossetia selatan. Pasukan ini melakukan mandat perjanjian mulai bulan Juli dan secara aktif melakukan patroli di sepanjang zona konflik. Selain itu, OSCE juga menyetujui untuk memantau gencatan senjata dan memfasilitasi negosiasi. OSCE berusaha menghilangkan sumber-



sumber ketegangan, mendukung gencatan senjata yang ada dan memfasilitasi kerangka kerja politik yang lebih luas untuk mengurangi ketidakharmonisan jangka panjang<sup>66</sup>.

Perjanjian ini secara efektif mengakhiri perang di Ossetia Selatan tanpa deklarasi kemenangan dari satu pihak mana pun. Kenyataannya, Georgia merupakan pihak yang kalah karena secara *de facto*, Ossetia Selatan telah melepaskan diri dari control Georgia walaupun secara *de Jure* masih berada dalam lingkup wilayah Georgia. Dan konsekuensi Georgia harus menerima kehadiran Rusia yang notabene merupakan pemimpin JPFK di wilayah perbatasan yang hanya beberapa jam dari Tbilisi. Dengan kehadiran JPFK di Ossetia Selatan dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut, setidaknya dapat menjadi penghalang hasrat Georgia untuk menyelesaikan permasalahan di Ossetia Selatan dengan cara militer. Situasi ini cukup bertahan hingga tahun 2003-2004 ketika terjadi beberapa perubahan lingkup domestik Georgia yang menghidupkan kembali konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan yang puncaknya meletus tahun 2008.

Selama konflik yang terjadi pada tahun 1991-1992, diperkirakan korban tewas mencapai sekitar 2.000 orang, 3500 orang mengalami luka-luka and lebih dari 120 orang hilang<sup>67</sup>. Hal ini juga menyebabkan arus pengungsi besar dimana sekitar 100.000 warga Ossetia Selatan mengungsi ke Ossetia Utara sedangkan 23.000 warga Georgia mengungsi dan menetap ke wilayah Georgia lainnya<sup>68</sup>. Arus pengungsi ke Ossetia Utara

---

*Sochi Agreement* dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Sochi\\_agreement#South\\_Ossetia\\_agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/Sochi_agreement#South_Ossetia_agreement) diakses Tanggal 14 Oktober 2011

*South Ossetia and Georgia: Historic Roots of Conflict*, Loc.Cit

<http://www.hrw.org/reports/1996/Russia.htm> diakses tanggal 14 Oktober 2011

memperparah situasi ketegangan etnis di sana dan memainkan peran penting dalam konflik Ossetia-Ingushetia<sup>69</sup>.

### **B.3.Referendum Tahun 2006**

Pada 12 Agustus 2006 Ossetia Selatan menggelar referendum yang bertujuan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan tidak bergantung kepada Georgia. Bilik-bilik suara telah dibuka sejak pukul 8 pagi dan ditutup pada sore hari. Sekitar lima puluh lima ribu warga yang memiliki hak pilih datang secara berduyun-duyun mendatangi bilik-bilik suara tersebut. Dalam surat suara tersebut tertulis "haruskah mempertahankan status Ossetia Selatan sekarang menjadi sebuah negara merdeka secara de facto?" dan hasilnya menyatakan bahwa 99% warga Ossetia Selatan memilih ya untuk kedaulatan Ossetia Selatan. Referendum yang digelar bertepatan dengan pemilihan Presiden Ossetia Selatan yang hasilnya menyatakan bahwa Presiden Eduard Kokoty menjadi pemenang pemilu dengan prosentase 98,1% suara<sup>70</sup>.

Pasca Referendum tersebut digelar, bendera Ossetia Selatan dikibarkan dan para warga menggelar pawai di sepanjang wilayah tersebut. Sedangkan warga etnis Georgia yang tinggal di wilayah Ossetia Selatan yang tidak menyetujui hasil referendum tersebut, melakukan pemboikotan. Referendum itu menguji keinginan kepemimpinan yang tidak menerima bentuk republik yang dipegang oleh Eduard Kokoty bakal menang. Sebelumnya pemerintahan provinsi itu secara de facto mengumumkan referendum adalah langkah awal buat pengakuan kepada dunia internasional mereka ingin bergabung dengan Rusia<sup>71</sup>.

---

*Ibid*  
South Ossetia Presidential Election 2006 dari  
[http://en.wikipedia.org/wiki/South\\_Ossetian\\_presidential\\_elections\\_2006](http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetian_presidential_elections_2006) tanggal 14Oktober 2011  
brk,20061112-87529,id.html diakses tanggal 14Oktober 2011

Referendum tersebut justru memicu ketegangan hubungan antara Rusia yang mendukung kemerdekaan Ossetia Selatan dengan Georgia yang ingin tetap mempertahankan Ossetia Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Penolakan atas hasil referendum tidak hanya datang dari Georgia, namun juga dari dunia Internasional. Penolakan tersirat dari pernyataan Menteri luar negeri dan OSCE yang menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil referendum dan mengutuknya sebagai tindakan yang tidak produktif<sup>72</sup>.

#### B.4. Konflik Tahun 2008



Pada tanggal 6 Agustus 2008, Georgia melakukan serangan kejutan dengan membombardir wilayah ibu kota Ossetia Selatan, Tskhinvali dengan tujuan merebut kembali kontrol di provinsi separatis tersebut yang berbatasan dengan Ossetia Utara. Selain itu alasan Georgia melakukan operasi militer tersebut adalah sebagai respon atas serangan yang dilakukan pihak separatis Ossetia Selatan di desa-desa etnis Georgia. Akibat serangan tersebut asap tebal membubung dari bangunan yang terhantam artileri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

kota Ossetia Selatan, tewas dalam serangan tersebut<sup>73</sup>. Sebelum Georgia melakukan operasi militer secara massif ke Tskhinvalli, telah terjadi bentrokan antara pihak militer Georgia dan gerilyawan Ossetia Selatan yang menewaskan 20 orang<sup>74</sup>.

Korban tewas tidak hanya dari kalangan sipil namun juga dari kalangan tentara perdamaian Rusia. Sedikitnya sepuluh tentara perdamaian Rusia tewas dari keganasan operasi militer Georgia. Tidak hanya Tskhinvalli saja yang menjadi korban Kota-kota lain di wilayah Ossetia Selatan seperti Sinagarsk, Hetagu, Zaursk, Dmenisi dan Gromi juga dimasuki oleh tentara Georgia<sup>75</sup>.

Selang dua hari kemudian pada tanggal 8 Agustus 2008, Sebanyak 2.500 tentara Rusia merangsek masuk ke wilayah ibu kota Ossetia Selatan, Tskhinvalli dengan menggunakan tank-tank dan artileri yang bertujuan untuk membantu gerilyawan Ossetia Selatan dalam mengusir tentara Georgia keluar dari wilayah tersebut. Rusia menyerbu secara frontal kepada tentara Georgia di wilayah yang tengah ingin melepaskan diri dari Georgia itu. Selain bertujuan untuk membantu gerilyawan Ossetia Selatan, Rusia juga ingin membebaskan wilayah tersebut dari cengkaman operasi militer Georgia. Rusia tidak hanya mengerahkan serangan-serangannya ke Tskhinvalli saja, tetapi juga sampai wilayah Georgia.

Melalui jalur udara, jet-jet tempur Rusia meluncur dan secara bergantian membombardir Georgia Tengah tepatnya di kota Gori yang letaknya berdekatan dengan wilayah Ossetia Selatan serta satu lagi dekat jaringan pipa Baku-Tbilisi-

Ceyhan (BTC) yang terpanjang kedua di dunia<sup>76</sup>. Pelabuhan Poti di wilayah laut Hitam yang memiliki depot sekaligus fasilitas pengiriman minyak cukup besar serta energi lainnya dari Laut Kaspia ke Barat, juga ikut menjadi sasaran. Sebuah blok apartemen yang terletak di kota Gori pun terkena hantaman bom-bom jet-jet tempur Rusia sehingga apartemen tersebut hancur dan mengalami kerusakan berat serta menewaskan enam puluh warga yang berada dalam apartemen tersebut. Sebuah pabrik yang menghasilkan pesawat sukhoi-25 untuk Georgia pun yang terletak di pinggiran Tbilisi juga tidak luput dari pembombardiran jet-jet tempur Rusia.

Sementara menurut Reuters, jumlah korban tewas dari kalangan militer Georgia berjumlah 129 orang dan 2 jet tempur Rusia berhasil di tembak jatuh<sup>77</sup>. Tidak hanya kota Gori dan Pelabuhan Poti yang menjadi sasaran, bahkan sasaran-sasaran militer di seluruh negara itu serta perlintasan kereta api dan satu bandara pun tidak luput dari operasi militer Rusia. Mengenai jumlah korban tewas yang disampaikan Reuters, berbeda dengan apa yang dikonfirmasi oleh pihak militer Georgia. Pihak militer Georgia mengkonfirmasi hanya 30 tentaranya yang tewas, sementara itu dari pihak Rusia, tentara yang tewas bertambah menjadi 15 orang. Otoritas pemerintah Ossetia Selatan mengkonfirmasi bahwa jumlah korban tewas di Tskhinvalli mencapai 1.600 orang. Kondisi jalan-jalan di Tskhinvalli di penuh dengan tank-tank yang terbakar, anak-anak yang berlari mencari perlindungan dan rumah sakit yang dipenuhi para korban<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> Rusia Lancarkan Serangan Sementara Konflik Ossetia Memanas dari <http://www.antaraneews.com/view/?i=1218301520&c=INT&s=> diakses tanggal 16 Oktober 2011

<sup>77</sup> perebutkan-ossetia-selatan-rusia-serang-georgia-60-warga-tewas.html diakses tanggal 16 Oktober 2011

Sejak Rusia mencampuri urusan domestik Georgia dengan mengarahkan angkatan laut, darat, dan udaranya di wilayah Ossetia Selatan dan Georgia, pada 9 Agustus 2008, Georgia menyatakan secara resmi perang kepada Rusia. Parlemen Georgia menyetujui dekrit presiden yang menyatakan Georgia dalam keadaan perang selama 15 hari<sup>79</sup>. Mikhail Shaakashvilli mengungkapkan bahwa Georgia sedang menghadapi agresi total dari Rusia. Sementara itu, Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah agresi melainkan cara untuk memaksa Georgia memelihara perdamaian di Ossetia Selatan<sup>80</sup>.

Pada 10 Agustus 2008, setelah tiga hari bertempur di wilayah Ossetia Selatan, tentara Georgia keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Rusia akhirnya mengambil alih kendali seluruh wilayah Ossetia Selatan dan mengepung Georgia dari berbagai penjuru dan menghentikan suplai militer ke Georgia. Menurut Shota Utiashvili, juru bicara Kemendagri Georgia mengatakan bahwa konvoi pasukan dan artileri meninggalkan Ossetia Selatan melalui Ergneti, sebuah desa di wilayah Georgia yang berada di selatan kota Tskhinvali, ibu kota Ossetia Selatan<sup>81</sup>. Semua pasukan Georgia telah mundur. Utiashvili menambahkan bahwa dalam beberapa jam Rusia telah mengerahkan 6.000 tentaranya dan akan mengirim 4.000 tentara lagi melalui jalur laut.

Sebetulnya Mikhail Shaakashvilli telah berkali-kali menawarkan gencatan senjata, namun Rusia selalu menolak dan akan menerima tawaran Georgia apabila Georgia menarik pasukan terlebih dahulu dan berjanji tidak akan menggunakan

kekuatan militer terhadap Ossetia Selatan. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, yang mengunjungi wilayah perbatasan dengan Ossetia Selatan dan bertemu para pengungsi, mengungkapkan bahwa tindakan Rusia di Ossetia Selatan adalah sah<sup>82</sup>.

Sementara itu pada hari yang sama, Rusia mengebom pangkalan udara di luar ibu kota Georgia, Tbilisi<sup>83</sup>. Pejabat Rusia mengatakan bahwa korban tewas dalam pertempuran mencapai 2.000 orang namun pihak Georgia mengklaim bahwa itu hanya propaganda Rusia dan mengatakan 300 orang tewas di Georgia, terutama warga sipil. Lebih dari 36.000 pengungsi dari Ossetia Selatan telah membanjiri perbatasan dalam 36 jam terakhir.<sup>84</sup>

Rusia kembali membuka konfrontasi dengan Georgia pada 11 Agustus 2008. Kendaraan-kendaraan tempur tentara Rusia terus merangsek masuk dan mengepung sebuah markas militer di kota Senaki yang berada di sebelah barat wilayah Georgia. Meski Mikhail Shaakasvilli telah mengajukan gencatan senjata, namun hal itu tidak mengurangi gempuran tentara Rusia. Sebelumnya pada hari minggu malam sampai hari senin, Pesawat-pesawat tempur Rusia melakukan pemboman terhadap radar-radar di bandara Internasional Tbilisi. Meski begitu, radar-radar tersebut tidak mengalami kerusakan berat<sup>85</sup>. Dampak dari pengeboman yang dilakukan Rusia membuat sejumlah penerbangan ke Tbilisi tertunda, maskapai penerbangan Austria, Azerbaijan dan Turki menghentikan penerbangannya ke kota tersebut<sup>86</sup>.

---

*Ibid*

*Ibid*

*Ibid*

Rusia \_ Informasi Berita Perkembangan Politik Terkini \_ Page 10.htm diakses tanggal 16 Oktober 2011

Rusia.Invasi.Georgia.htm diakses tanggal 16 Oktober 2011

Krisis yang terjadi hampir selama sepekan, mengundang keprihatinan dan kecaman dari dunia Internasional<sup>87</sup>. Tuduhan pun banyak diarahkan kepada Rusia yang dinilai telah menginvasi negara tetangganya. Sekjen Pakta Atlantik Utara atau NATO menuduh Rusia telah menggunakan kekuatan berlebihan dan melanggar wilayah Georgia dengan aksi militer di luar wilayah Ossetia Selatan. Inggris dan Amerika Serikat yang sama-sama mendukung sekutu mereka, Georgia juga mengecam tindakan Rusia. Menlu Inggris David Miliband, mengecam Moskow karena membom target yang jauh di luar wilayah Ossetia Selatan. Sementara Presiden AS George W Bush juga ikut mengecam tindakan militer Rusia terhadap Georgia. Menurutnya, kekerasan di wilayah Ossetia Selatan tidak bisa diterima dan menuding pengeboman yang dilakukan oleh pasukan Rusia tidak proporsional dan ia menambahkan bahwa konflik yang terjadi bisa segera diselesaikan melalui jalan damai.

Upaya mediasi konflik pun segera di gelar, Menlu-menlu Uni Eropa menggelar pertemuan darurat sehari berikutnya dengan agenda, mendengarkan laporan Menlu Perancis Bernard Kouchner yang tengah berada di Georgia guna mengupayakan adanya mediasi konflik. Kouchner mengusulkan rencana untuk mengakhiri perang antara Georgia dan Rusia soal Ossetia Selatan melalui gencatan senjata segera, setelah penarikan pasukan ke posisi sebelum Georgia melakukan serangan ke Ossetia Selatan dan penghormatan atas keutuhan wilayah Georgia. Apa yang telah Benhard Kouchner upayakan , mendapat tanggapan berbeda-beda dari berbagai pihak.

Menlu Polandia, Radoslaw Sikorski mengungkapkan bahwa Uni Eropa bisa memainkan peran stabilisasi di wilayah tersebut. Polandia dan negara-negara Balkan turut



mengecam Rusia atas "agresi" terhadap Georgia. Para menlu negara-negara G-7 mendesak Rusia untuk menerima usulan gencatan senjata. Tanggapan yang justru bertolak belakang datang dari Silvio Berlusconi Perdana Menteri Italia. Menurutnya, sulit untuk menciptakan sentimen anti Rusia di Eropa<sup>88</sup>.

## C. Paska Konflik tahun 2008

### C.1. Gencatan Senjata

Pada tanggal 12 Agustus 2008, Presiden Rusia Dmitry Medvedev memerintahkan tentaranya untuk mengakhiri operasi militer dan segera menyetujui enam butir rencana perjanjian damai yang di tengahi Presiden Uni Eropa sekaligus Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy di Moskow. Isi dari enam butir rencana perjanjian damai tersebut adalah<sup>89</sup>:

1. Tidak ada jalan lain untuk menggunakan kekerasan
2. Menghentikan permusuhan
3. Pemberian akses untuk bantuan kemanusiaan
4. Mengembalikan angkatan bersenjata Georgia ke tempat semula
5. Angkatan bersenjata Rusia ditarik mundur ke posisi sebelum permusuhan dimulai di Ossetia Selatan. Pasukan penjaga perdamaian Rusia diharapkan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan sampai mekanisme pemantauan internasional dibuat.
6. Pembukaan diskusi internasional pada modalitas keamanan dan stabilitas Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Setelah sepekan berkonflik, akhirnya kedua negara yang sama-sama bekas Uni Soviet itu melakukan penandatanganan gencatan senjata yang di mediasi oleh Presiden Uni Eropa yang juga Presiden Perancis, Nikholas Sarkozy pada 15 Agustus 2008. Kedua negara tersebut sepakat untuk menandatangani gencatan senjata walaupun dalam waktu dan tempat yang secara terpisah. Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani di Moskow pada 16 Agustus 2008. Sedangkan Presiden Georgia, Mikhail Shaakashvilli menandatangani pada 17 Agustus 2008. Sebelumnya, Rusia pernah menolak proposal negara-negara Barat di Dewan Keamanan PBB yang isinya mendesak untuk melakukan gencatan senjata, menghargai kedaulatan dan keutuhan wilayah Georgia serta menarik pasukan ke wilayah sebelum peperangan merebak. Bagi Rusia usulan itu berat sebelah karena tidak mengharuskan Georgia menghentikan penggunaan senjata terhadap separatis Ossetia Selatan<sup>90</sup>.

Situasi di ibukota Ossetia Selatan relatif tenang meski insiden-insiden kecil berupa suara tembakan masih terdengar dan tidak sampai terjadi insiden besar. Sementara itu di Moskow, bendera Rusia dikibarkan setengah tiang, menandai hari berkabung atas jatuhnya korban tewas ketika Rusia mengerahkan tank dan tentaranya ke Ossetia Selatan untuk menghentikan operasi militer Georgia yang ingin kembali merebut provinsi separatis itu<sup>91</sup>.

Sekalipun perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani belum berarti pasukan Rusia yang tengah berada di Georgia ditarik mundur. Menurut Menlu Rusia, Sergei Lavrov, ia mengatakan bahwa tentara Rusia di Georgia tidak memiliki tenggat

waktu untuk mundur seperti yang disyaratkan dalam perjanjian damai<sup>92</sup>. Dalam beberapa hari ke depan, tentara Rusia masih melakukan patroli di Georgia terutama di kota Gori. Baru setelah dirasa cukup pada tanggal 22 Agustus 2008, Rusia menarik semua tentaranya dari kota Gori, Georgia, setelah sebelumnya mengusir tentara Georgia dari Ossetia Selatan pada 10 Agustus silam.

### **C.2. Pengakuan Kedaulatan Oleh Rusia**

Pada tanggal 25 Agustus 2008, Parlemen Rusia dalam hal ini Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Federasi Rusia secara aklamasi memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan yang ingin melepaskan diri dari Georgia. Pemungutan suara di Majelis Rendah Duma menghasilkan suara 447-0, sementara Majelis Tinggi Dewan Federal Rusia menghasilkan 130-0 bagi pengakuan kemerdekaan atas Ossetia Selatan<sup>93</sup>. Sehari kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa ia telah menandatangani pengakuan Resmi Rusia atas kemerdekaan wilayah tersebut.

Bagi warga Ossetia Selatan, pengakuan kedaulatan yang telah diberikan oleh Rusia kepada mereka sudah sangat dinantikan. Mengingat sebelumnya Ossetia Selatan menggelar referendum sebanyak dua kali yakni pada tahun 1990 dan 2006 yang menunjukkan keinginan rakyat Ossetia Selatan untuk meraih suatu kemerdekaan. Meski begitu referendum yang dilakukan sebanyak dua kali selalu mendapat dukungan dari Rusia namun tidak pernah mendapat pengakuan secara resmi.

---

rusia.tandatangani.gencatan.senjata.htm diakses tanggal 16 Oktober 2011  
[http://indonesianvoices.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=178:mengapa-rusia-merasa-tertentangan-dengan-as-dan-nato&catid=1:latest-news](http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178:mengapa-rusia-merasa-tertentangan-dengan-as-dan-nato&catid=1:latest-news)

Kemerdekaan bagi rakyat Ossetia Selatan memiliki makna bebas dari Georgia. Selama ini Rakyat Ossetia Selatan merasa dilecehkan dan selalu mendapat diskriminasi. Bahkan kebanyakan dari mereka selalu bermimpi untuk dapat bersatu dengan saudara-saudara mereka di seberang perbatasan, Ossetia Utara yang menjadi bagian dari wilayah Rusia. Kenangan mereka sebagai sebuah bangsa yang makmur dalam bingkai Kerajaan Alania tidak jarang hadir dalam benak mereka<sup>94</sup>.

Pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan, tidak hanya datang dari Rusia saja, negara-negara lain juga mengikuti jejak Rusia dalam memberikan pengakuan kedaulatan pada Ossetia Selatan. Nikaragua merupakan negara pertama setelah Rusia dalam memberikan pengakuan kedaulatan secara "penuh" kepada Ossetia Selatan. Lalu di susul oleh Venezuela pada tanggal 10 September 2009. Nauru, sebuah negara kecil di kawasan Asia Pasifik juga tidak ketinggalan dalam memberikan pengakuan kedaulatan pada Ossetia Selatan<sup>95</sup>.

### **C.3. Reaksi Dunia Internasional Paska Pengakuan Kedaulatan Oleh Rusia**

Keputusan Rusia dalam memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan tentu mendapatkan tanggapan dan reaksi yang berbeda-beda dari dunia Internasional. Pengakuan kedaulatan yang diberikan oleh Rusia kepada Ossetia Selatan mayoritas memancing kecaman dari Georgia dan negara-negara Barat. Mayoritas negara-negara di dunia masih menganggap bahwa Ossetia Selatan sebagai bagian dari Georgia. Meski begitu, Rusia tetap berupaya menyuarakan pengakuan

kepada Ossetia Selatan. Pengakuan itu merupakan satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan tersebut<sup>96</sup>.

Menlu Georgia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia sama saja dengan mencaplok wilayah tersebut. Sementara menurut Perancis soal keputusan Rusia mengakui kedaulatan Ossetia Selatan, dinilai sebagai sebuah hal yang patut disesalkan.<sup>97</sup> Reaksi pedas justru ditunjukkan oleh Presiden Amerika Serikat, George W Bush yang menyebut tindakan Rusia itu merupakan hal yang tidak bertanggung jawab. Reaksi paling lugas atas keputusan Rusia memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan datang dari jubar presiden AS, Tony Fratto yang menurutnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Rusia untuk menegaskan kemerdekaan Ossetia Selatan dipangung politik Internasional bakal mengalami kegagalan.

Reaksi yang cukup tegas datang dari Kanselir Jerman, Angela Merkel yang menyatakan bahwa keputusan Rusia tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Meski bereaksi cukup tegas, Merkel masih bisa menahan diri. Lebih lanjut Merkel menegaskan, perang di Georgia tidak hanya mengubah peta politik di kawasan Kaukasus melainkan juga di seluruh dunia. Karena itu ia mengingatkan, agar semua bertindak secara berhati-hati. Meskipun begitu, Jerman dan Perancis tetap menjalin hubungan dengan Rusia melalui jalan dialog.

Sebaliknya, Presiden Rusia Dmitry Medvedev malah membela keputusannya dalam mendukung kedaulatan Ossetia Selatan dengan membandingkan situasinya dengan kasus Kosovo. Dalam sebuah tulisannya di harian Inggris Financial Times edisi

Rabu, Medvedev mengungkapkan bahwa tidak ada aturan Internasional yang berlaku untuk satu pihak tapi tidak berlaku untuk yang lainnya<sup>98</sup>.

#### **C.4. Peningkatan Hubungan Rusia-Ossetia Selatan**

Paska Rusia memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan, Rusia segera melakukan kerjasama dengan Ossetia Selatan baik dalam bidang perdagangan, ekonomi dan militer. Upaya Rusia dalam meningkatkan hubungannya dengan Ossetia Selatan, agar negara tersebut dapat memiliki posisi yang kuat dalam kancah Internasional<sup>99</sup>. Selain melakukan kerjasama dengan Ossetia Selatan, Rusia juga melakukan penandatanganan persahabatan dengan negara tersebut.

Kerjasama yang direncanakan baru sebatas proses penyusunan naskah kerjasama dan akan ditandatangani oleh Presiden Dmitry Medvedev saat melakukan lawatan ke negara tersebut. Kerjasama yang akan dilakukan, dalam bidang militer, Rusia akan membangun pangkalan militernya di Ossetia Selatan. Sedangkan di bidang ekonomi, Rusia akan mengeksport gas ke Ossetia Selatan dan menjadikan warga Ossetia Selatan yang mayoritas merupakan etnis Rusia sebagai mitra kerjanya.

Menurut para pengamat politik, Kesepakatan kerjasama antara Rusia dengan Ossetia Selatan dilakukan untuk mereaksi kesepakatan strategis antara Amerika Serikat dengan Georgia. Mengingat sikap dan hubungan yang intens yang diperlihatkan Georgia kepada Amerika Serikat telah menciptakan segudang masalah bagi jalinan hubungan Rusia dengan Georgia<sup>100</sup>.

## BAB IV

### TUJUAN RUSIA MELAKUKAN INTERVENSI

#### DALAM KONFLIK OSSETIA SELATAN PADA TAHUN 2008

Gejolak konflik yang terjadi di wilayah Ossetia Selatan antara pihak separatistis wilayah tersebut dengan militer Georgia, membuat Rusia turun tangan dan perlu untuk terlibat dalam konflik ini. Keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut didasari oleh kepentingan-kepentingannya yang sudah mulai terancam akibat ulah militer Georgia ini.

Kepentingan-kepentingan Rusia dibalik terlibatnya negara tersebut dalam konflik yang terjadi di Ossetia Selatan, kebanyakan didasari oleh konsep kebijakan luar negeri Rusia tahun 2008 yaitu<sup>101</sup>:

1. Rusia mengakui supremasi prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional yang menentukan hubungan antara masyarakat beradab. Rusia akan membangun hubungan-hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip dan konsep dari hukum Internasional.
2. Dunia harus bersifat multipolar bukan Uni Polar. Rusia tidak bisa menerima sebuah tatanan dunia dimana seluruh keputusan diambil oleh hanya satu negara, bahkan sebuah negara yang sangat berpengaruh seperti Amerika Serikat. Dunia semacam ini tidaklah stabil dan terancam oleh konflik.
3. Rusia tidak menginginkan konfrontasi dengan negara lain. Rusia tidak berniat mengisolasi diri sendiri dan sebanyak mungkin menjalin hubungan yang bersahabat dengan Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya.

4. Prioritas mutlak dari Rusia adalah melindungi nyawa dan martabat warga negaranya dimanapun mereka berada serta melindungi kaum usahawan di luar negeri. Rusia akan merespon Setiap tindakan agresif yang ditujukan kepadanya.
5. Rusia memiliki kepentingan istimewa di kawasan tertentu. Kawasan yang terdiri dari negara-negara yang memiliki hubungan historis Rusia serta terikat sebagai tetangga dan sahabat baik bagi Rusia. Rusia akan memberikan perhatian penuh pada hubungan yang baik dan bersahabat dengan negara-negara yang menjadi tetangga terdekat negara Rusia ini.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara luas kepentingan-kepentingan apa saja dibalik keterlibatan Rusia dalam konflik yang terjadi di Ossetia Selatan yang berlangsung hampir selama sepekan pada awal Agustus 2008 sebagai hipotesis yang telah di tetapkan.

#### **A. Melindungi Etnis atau Warga Rusia yang Bermukim Di Ossetia Selatan**

Di awal bulan Agustus tahun 2008, Georgia melakukan serangan kejutan dengan membombardir wilayah Ossetia Selatan. Selang sehari atau dua hari kemudian Rusia membantu pihak separatis Ossetia Selatan dengan memberikan serangan balasan kepada Georgia secara massif. Alasan Rusia menerjunkan diri dengan terlibat dalam konflik tersebut karena Rusia mempunyai kepentingan untuk melakukan pembelaan terhadap warga negaranya yang terkena agresi militer Georgia.

Rusia mencium adanya pembersihan etnis yang dilakukan oleh Georgia. Maka dari itu Rusia tidak segan-segan memberikan pelajaran keras kepada Georgia dengan membombardir negara tersebut tanpa ampun. Rusia menilai tentang apa yang telah dilakukan oleh Georgia merupakan sebuah invasi yang kejam dan merusak. Selain itu



alasan Rusia memberikan serangan balasan kepada Georgia, hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindarkan eskalasi konflik yang lebih besar, menghindarkan pertumpahan darah serta menginginkan pemerintah, rakyat, dan nilai-nilainya di hormati.

Rusia juga menilai bahwa operasi militer yang ditujukan oleh Georgia ke wilayah Ossetia Selatan terutama ibu kota Tskhinvalli merupakan petualangan militer yang kotor, dan Rusia memperingatkan Georgia dengan melakukan serangan balasan kepadanya agar Georgia segera melakukan perdamaian dengan penduduk Ossetia Selatan mengingat Kondisi rakyat di wilayah tersebut semakin memburuk dan banyak warga sipil yang mati akibat kelaparan.

Seperti yang tertuang dalam prinsip ke empat dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia (2008) yang dikemukakan oleh Dmitry Medvedev:

*Prioritas kita yang pasti adalah pembelaan hidup dan martabat manusia warga negara kita dimanapun mereka berada. Inilah dasar kebijakan luar negeri kita. Kita akan juga memperlindungi kepentingan kaum usahawan kita di luar negeri. Dan semua harus paham – kalau siapapun membuat serangan agresif, pastilah akan dibalas<sup>102</sup>.*

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Dmitry Medvedev tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rusia tidak akan main-main dan akan menindak secara tegas terhadap siapapun, negara mana pun yang melakukan agresifitas kepada warga negara Rusia baik itu di dalam atau diluar wilayah Rusia, pastilah akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Demi menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Ossetia Selatan, Rusia mengupayakan dua hal demi melindungi etnis Rusia di wilayah tersebut. Pertama,

<sup>2</sup> Lima Prinsip Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam [http://www.indonesia.mid.ru/mfa\\_ind\\_02.html](http://www.indonesia.mid.ru/mfa_ind_02.html) diakses tanggal

membangun pangkalan militer di tersebut. Kedua, menyerukan kepada negara-negara lain agar memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan.

Kepastian Rusia untuk membangun pangkalan militer di dapat setelah Eduard Kokoty, Presiden Ossetia Selatan memberi lampu hijau pada Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di wilayahnya. Ossetia Selatan menyatakan izin pada pasukan Rusia untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya dan menempatnya selama 99 tahun sejak 11 Maret 2009. Rusia pun berjanji untuk menempatkan 3.800 tentaranya di wilayah itu. Pangkalan militer tersebut secara resmi akan digunakan apabila instalasi pendukung pangkalan selsai dipasang.

Kepala staf umum angkatan bersenjata Rusia, Yuri Baluyevsky menyatakan bahwa Rusia telah menganggap Ossetia Selatan sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat dan juga merupakan sekutu bagi Rusia. Penangkalan dan penggunaan senjata nuklir serta angkatan senjata akan digunakan jika perlu untuk melindungi Rusia dan sekutunya apabila sewaktu-waktu mendapat ancaman yang tidak terduga.

Sebagaimana yang dikutip dari kantor berita Rusia pada Konferensi ilmiah Academy of Military Sciences, Baluyevsky mengungkapkan:

*“Kami tidak bermaksud menyerang siapapun. Namun semua mitra kami harus menyadari bahwa untuk melindungi Rusia dan sekutu-sekutunya bila perlu menggunakan angkatan bersenjata, termasuk penangkalan dan penggunaan senjata nuklir”*<sup>103</sup>

Apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Rusia mendapat respon yang kurang baik dari Georgia dan pihak barat. Menurut mereka, Rusia telah melanggar gencatan senjata yang mengakhiri perang yang terjadi selama lima hari di awal Agustus tersebut.

Upaya Rusia yang kedua, pasca gencatan senjata antara Rusia dengan Georgia yang ditengahi oleh Perancis ditandatangani, Rusia segera memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan dan diikuti oleh beberapa negara lain seperti Belarusia, Nikaragua, Venezuela dan Nauru. Tak lupa Rusia pun menyeru kepada negara-negara lain untuk segera memberikan pengakuan kedaulatan kepada Ossetia Selatan. Rusia melakukan upaya tersebut guna terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian bagi penduduk Ossetia Selatan. Meski begitu, mayoritas negara-negara di dunia masih menganggap bahwa Ossetia Selatan masih menjadi bagian dari Georgia. Dan apa yang Rusia upayakan justru mendapat kecaman dari Georgia dan juga protes dari Swedia, AS, Polandia, Ukraina, negara-negara baltik, OSCE serta NATO.

Keterlibatan Rusia dalam konflik yang terjadi di Ossetia Selatan adalah demi melindungi warganya dari agresi militer Georgia. Namun banyak pihak justru menilai bahwa hal itu hanya dalih Rusia saja dan pasti Rusia memiliki kepentingan lain dibalik keterlibatannya dalam konflik yang terjadi di wilayah separatis tersebut. Sebelumnya pada tahun 1993 Rusia telah memberikan paspor kepada penduduk Ossetia Selatan dan saat ini 70 persen warga Ossetia Selatan telah memegang paspor Rusia.

## **B. Mencegah Pengaruh Barat yang Semakin Meluas Agar Tidak Masuk**

### **Wilayah Ossetia Selatan**

Sang beruang merah sudah tidak loyo lagi. Kalimat tersebut secara tepat menggambarkan kondisi bangsa Rusia saat ini yang mulai bangkit dari keternurukan baik

itu secara ekonomi maupun militer. Bangsa Rusia kini sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia menjadi bangsa yang mandiri namun berada dibawah pengaruh Amerika Serikat dan berdampak pada lepasnya satu persatu negara-negara bekas Uni Soviet yang telah menjadi sekutunya, berpaling untuk bergabung dengan NATO. Rusia saat itu terisolir dan dengan pasrah menerima penggerogotan yang dilakukan pihak barat(NATO-AS).

Tetapi ketika Vladimir Putin naik menggantikan Boris Yeltsin dan memegang tampuk kekuasaan Rusia, ia mempunyai visi dan misi untuk kembali membangun Rusia raya atau kejayaan Rusia seperti kejayaan Uni Soviet dahulu meski hal tersebut masih terlalu dini. Yang terpenting ialah Rusia saat ini kembali unjuk gigi dan siap untuk mengimbangi dominasi dan hegemoni AS di dunia ini. Sektor ekonomi dan sektor pertahanan kembali ditingkatkan.

Sejak Rusia bangkit dari keterpurukan baik itu secara ekonomi maupun militer, Rusia memperbaharui persenjataan militernya guna mengembalikan pengaruh Rusia dan menekan pengaruh NATO yang semakin meluas terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengannya. Dengan cara tersebut, membuat negara-negara bekas Uni Soviet akan mengalami rasa takut untuk bergabung dalam keanggotaan NATO.

Rusia sendiri merupakan sebuah negara yang besar dengan memiliki wilayah yang luas dan penduduk besar pula, namun Rusia tidak mempunyai perbatasan alam yang dapat mengamankannya dari serangan musuh yang datang dari luar. Kondisi ini membentuk mentalitas bangsa Rusia menjadi bangsa yang agresif. Salah

mengembangkan diri, menduduki daerah-daerah baru di sekelilingnya untuk dijadikan buffer zone<sup>104</sup>.

Aktivasi menciptakan tata dunia yang multi kutub diyakini dapat memecah konsentrasi kekuatan. Dengan terciptanya poros-poros kekuatan baru maka dominasi kekuatan dapat dihindari. Seperti yang tertuang dalam prinsip ketiga dalam kebijakan luar negeri Rusia (2008):

*dunia harus tetap menjadi multipolar. Unipolaritas tidak dapat diterima. Dominasi tidak dapat diberi izin. Kita tidak dapat menerima tata tertib dunia di mana semua putusan diambil oleh satu negara saja, bahkan kalau negara ini adalah begitu serius dan berwibawa seperti Amerika Serikat. Dunia seperti ini adalah tidak stabil dan diancamkan sengketa<sup>105</sup>.*

Rusia memandang penting posisi kawasan Kaukasus termasuk Ossetia Selatan dan Georgia. Hal ini didasarkan atas posisi geografis negara Kaukasia Selatan yaitu Ossetia Selatan yang mempunyai peranan penting dalam menjaga batas selatan Rusia terhadap pengaruh Turki, Iran, dan Barat. Hal ini didasarkan atas faktor sejarah dimana kawasan kaukasus merupakan wilayah yang pernah diperebutkan oleh Rusia, Iran, dan Ottoman (sekarang Turki) sejak abad 19<sup>106</sup>.

Pengaruh barat mulai masuk ke Georgia saat Mikhail Shaakshvilli memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Visi dan misi yang ia kembangkan adalah soal kemajuan ekonomi dan demokratisasi. Oleh karena itu Shaakashvilli lebih memilih

berhubungan secara intens dengan AS dan negara-negara Eropa barat ketimbang Rusia. Dari segi ekonomi, sejak awal tahun 2000 mulai terlihat perkembangan ekonomi negara ini mulai menunjukkan hal yang positif. Pertumbuhan GDP Georgia yang didorong oleh keuntungan di sektor industri dan jasa, berada dalam kisaran 9-12% di tahun 2004-2007. Bank Dunia pun menggelari Georgia sebagai reformis atau pembaharu ekonomi nomor satu di dunia karena mampu meningkatkan ranking ekonomi mereka secara signifikan. Berikut tabel perkembangan GDP Georgia dari tahun ke tahun (dalam jumlah %)<sup>107</sup>:

**Tabel 4.1 Perkembangan GDP dan Pendapatan Perkapita Georgia  
dari tahun 1999-2010**

| Tahun | (%)  | Perkapita (\$) |
|-------|------|----------------|
| 1999  | 3,5  | 2,300          |
| 2000  | 1,9  | 4,600          |
| 2002  | 4    | 3,100          |
| 2003  | 5,5  | 2,500          |
| 2004  | 9,5  | 3,100          |
| 2005  | 9,3  | 3,400          |
| 2006  | 8    | 3,800          |
| 2007  | 12   | 4,400          |
| 2008  | 2,1  | 4,600          |
| 2009  | -3,9 | 4,500          |
| 2010  | 6,4  | 4,900          |

Sementara itu dari segi militer, Georgia yang mempunyai kesungguhan untuk menjadi anggota NATO, pada bulan Maret tahun 2007 mulai mengirim tentaranya

sebanyak 850 orang ke Irak dan kembali menambah jumlah tentaranya menjadi 2.000 orang demi memperkuat koalisi pasukan Amerika Serikat di sana<sup>108</sup>. Tidak hanya itu saja, segala kegiatan yang dilakukan oleh NATO-AS, Georgia ikut berpartisipasi di dalamnya, seperti mengikuti latihan militer bersama. Baik perkembangan ekonomi yang pesat serta partisipasi yang dilakukan oleh Georgia dengan mengirim satuan pasukannya ke Irak dan sering mengikuti latihan militer bersama, semua itu tidak lepas dari keterbukaan yang Georgia lakukan dan mulai dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa barat. Keterbukaan yang Georgia lakukan terhadap AS dan negara-negara Eropa barat malah mengundang kemarahan dari Rusia, yang mengakibatkan hubungan kedua negara merenggang.

Melalui konflik yang terjadi di wilayah Ossetia Selatan yang terjadi pada awal-awal bulan Agustus tahun 2008, menyiratkan suatu kepentingan Rusia dimana Rusia tidak akan membiarkan perluasan pengaruh NATO melalui tangan Georgia masuk ke wilayah Ossetia Selatan. Setiap upaya yang dilakukan oleh Rusia dengan menggunakan kekuatan senjata demi menghalau setiap upaya NATO kepada negara-negara tetangganya bukan hanya sekedar omong kosong belaka, tetapi juga diwujudkan dalam suatu tindakan<sup>109</sup>.

Ketika Ossetia Selatan mulai digempur oleh Georgia, Rusia turun tangan untuk menolong sekutunya tersebut dengan mengarahkan angkatan laut, udara dan angkatan daratnya untuk membantu pihak separatis Ossetia Selatan dan mengusir tentara Georgia keluar dari wilayah tersebut. Kemudian Rusia melancarkan serangan balasan ke wilayah-wilayah Georgia. Rusia mengingatkan kepada Georgia untuk melupakan dan membiarkan

Ossetia Selatan untuk melepaskan diri dan menjadi negara yang berdaulat, sebab Georgia sudah tidak memiliki hak akan wilayah tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan Rusia untuk mencegah agar pengaruh NATO melalui tangan Georgia tidak masuk ke wilayah Ossetia Selatan tidak hanya dengan membantu pihak separatis wilayah tersebut untuk mengusir tentara Georgia, tetapi juga dengan upaya lainnya yakni memberikan bantuan ekonomi dan militer serta merangkul Ossetia Selatan sebagai partner Rusia untuk mengimbangi pengaruh NATO yang semakin meluas.

Sejak pasca perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani di Sochi pada tahun 1992, Rusia mulai memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Ossetia Selatan. Bantuan militer yang diberikan oleh Rusia kepada Ossetia Selatan berupa pasokan senjata dan perlengkapan alat-alat militer. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ossetia Selatan terus berlangsung hingga konflik tahun 2008 pecah. Rusia merasa bahwa sudah waktunya untuk memperkuat ekonomi dan militer Ossetia Selatan guna dijadikan benteng bagi pengaruh Rusia dari ancaman perluasan NATO.

Pada akhirnya Rusia merangkul Ossetia Selatan dengan memberikan dukungan kepada nya untuk mengimbangi pengaruh NATO. Untuk mengimbangi pengaruh NATO yang semakin meluas agar tidak melimpah masuk ke wilayah Ossetia Selatan, Rusia tidak segan untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut.

### **C. Mencegah Georgia Bergabung Dalam Keanggotaan NATO**

Hampir selama sepekan, Rusia melancarkan serangan yang begitu keras kepada Georgia. Georgia pun seperti tidak berdaya dalam menghadapi gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh Rusia terutama ketika Rusia membombardir wilayahnya seperti ibu



kota Tbilisi dan Gori. Rusia memberikan dukungan atas Ossetia Selatan yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Georgia dan menjadi negara yang berdaulat. Terselip sebuah kepentingan Rusia dalam konflik ini dimana dengan mendukung Ossetia Selatan menjadi negara berdaulat, setidaknya hal tersebut menjadi penghalang bagi Georgia untuk masuk dalam keanggotaan NATO.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa sejak Eduard Shevarnadze digulingkan melalui revolusi mawar dan tampuk kekuasaan Georgia di pegang oleh Mikhail Shaakashvilli yang pro dengan barat membuat Rusia kecewa dan memendam kebencian dengan Georgia. Awal dari ketidakharmonisan hubungan Rusia dengan Georgia justru terjadi ketika Georgia memutuskan untuk keluar dari CIS (Commonwealth of Independence States) atau persatuan negara-negara persemakmuran bekas Uni Soviet dan lebih memilih untuk membina serta memperbaiki hubungan dengan Eropa barat dan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Georgia memalingkan muka dari Rusia, berusaha untuk bergabung menjadi anggota NATO, Uni Eropa dan menjadi anti Rusia,

Georgia mulai mengajukan diri sebagai anggota NATO sejak tahun 2004. Kesungguhan Georgia untuk memasuki keanggotaan pakta Atlantik Utara tersebut dibuktikan dengan aktifnya negara tersebut dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NATO. Pada bulan Agustus tahun 2004, Georgia telah menyampaikan secara resmi IPAP (Individual Partnership Action Plan) atau Rencana Aksi Persekutuan Individu kepada NATO. Dua bulan kemudian tepatnya 29 Oktober 2004, Dewan Atlantik Utara NATO menyetujui IPAP dan Georgia masuk dalam tahap kedua integrasi Euro-Atlantik. Pada tahun 2005 sebuah komisi di bentuk melalui keputusan presiden Georgia, Mikhail Shaakashvilli yang bertujuan untuk mengimplementasikan IPAP.

mengkoordinasikan kelompok antar departemen yang diketuai oleh Perdana Menteri. Komisi ini di bentuk dan diberikan tugas untuk mengkoordinir dan mengendalikan implementasi dari IPAP.

Pada 14 Febuari 2005, perjanjian pengangkatan persekutuan untuk perdamaian (Partnership for Perace) antara Georgia-NATO mulai menemukan titik terang, dimana seorang wakil penghubung untuk Kaukasus Selatan ditugaskan ke Georgia. Berikutnya pada Tanggal 2 Maret 2005, perjanjian ini ditandatangani pada ketetapan dari negara tuan rumah untuk mendukung dan juga sebagai tempat persinggahan kekuatan dan personil tentara NATO. Pada bulan yang sama tanggal 6 sampai 9 Maret 2006, tim penilai sementara implementasi IPAP bertugas di ibukota Georgia, Tblisi. Diskusi dari hasil penilaian implementasi IPAP di selenggarakan dalam format 26+1 pada tanggal 13 April 2006.

Paska Georgia mengajukan diri sebagai anggota NATO, Rusia yang telah memiliki ikatan dan membina hubungan bilateral dengan Georgia selama lebih dari 40 tahun lamanya, tentunya tidak akan membiarkan negara yang berada tepat di berandanya lepas begitu saja dari cengkraman pengaruhnya mengingat selama ini Georgia merupakan kawan setia baginya dan masuk dalam pengaruh barat. Ketidaksukaan Rusia terhadap Georgia dibawah pimpinan Mikhail Shaakashvilli terlihat dengan berbagai upayanya untuk selalu mengawasi kelakuan Georgia seperti melakukan kegiatan mata-mata yang mengakibatkan empat tentaranya di tahan dan Rusia tidak segan melakukan blokade mulai dari memutuskan hubungan kereta api, pesawat terbang dan layanan pos hingga

Selama pertemuan puncak NATO yang diselenggarakan di Bucharest, Rumania, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menyatakan bahwa Georgia diizinkan untuk bergabung dalam Rencana Aksi Keanggotaan) atau MAP (Membership Action Plan). Namun aliansi tersebut memutuskan untuk tidak menawarkan Georgia bergabung dalam rencana aksi keanggotaan tersebut karena oposisi dari beberapa negara semacam Jerman dan Perancis takut apabila keputusan itu di setujui soal Georgia bergabung dalam aksi keanggotaan tersebut bakal memancing kemarahan dari Rusia<sup>110</sup>.

Rencana Aksi Keanggotaan atau (MAP) merupakan sebuah program NATO yang mendukung saran, bantuan dan dukungan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan individual dari negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi tersebut. Mekanisme Rencana Aksi Keanggotaan atau (MAP) adalah suatu tahap dalam prosedur untuk negara-negara yang ingin bergabung, di mana aplikasi formal ditinjau oleh negara-negara anggota saat ini. Mekanisme ini telah disetujui dalam KTT Washington pada tahun 1999.

Di sela-sela Pertemuan Puncak NATO di Bucharest, Rumania, NATO menggelar pertemuan dengan Rusia pada 3 April 2008. Dalam pertemuan tersebut presiden Rusia Dmitry Medvedev jelas sangat menentang tawaran Georgia untuk masuk dalam keanggotaan NATO. Oleh karena itu Georgia yang keadaan domestiknya masih dilanda masalah perbatasan dalam permohonannya masuk dalam keanggotaan NATO pada akhirnya di tolak oleh negara-negara Pakta Atlantik Utara pada pertemuan puncak tersebut. Penolakan oleh negara-negara anggota NATO terhadap permohonan Georgia dalam keinginannya bergabung dengan NATO di dasari oleh prinsip perluasan keanggotaan NATO, yakni:

“Negara-negara yang memiliki sengketa atau perselisihan teritorial etnis eksternal, termasuk klaim irredentist, atau perselisihan internal harus menyelesaikan yurisdiksi perselisihan dengan cara damai sesuai dengan prinsip-prinsip OSCE. Resolusi perselisihan tersebut akan menjadi faktor dalam menentukan apakah akan mengundang negara tersebut untuk bergabung dengan Aliansi<sup>111</sup>”

Pada umumnya untuk bergabung dan menjadi anggota NATO tidak hanya soal menyelesaikan persoalan domestik saja seperti masalah perbatasan, tapi ada beberapa syarat lain yang mesti dipenuhi, yaitu<sup>112</sup>:

1. Menyatukan usaha untuk pertahanan kolektif dan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan; menyelesaikan setiap sengketa internasional di mana mereka mungkin terlibat dengan cara damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam, dapat menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam setiap cara yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Berkontribusi terhadap perkembangan hubungan internasional yang damai dan bersahabat dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bebas, dengan membawa pemahaman prinsip-prinsip soal lembaga yang didirikan, dan dengan mempromosikan kondisi stabilitas dan kesejahteraan.
3. Menjaga efektivitas Aliansi dengan berbagi peran, risiko, tanggung jawab, biaya dan manfaat yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum.
4. siap untuk berkontribusi secara finansial dalam anggaran dan keanggotaan.
5. Memiliki standart minimal operasi.

6. Bersedia memberikan izin tentara negara-negara sekutu lainnya untuk masuk dan beroperasi di wilayah yang dilanda krisis dan perang, atau menempatkan pasukan mereka sendiri di luar perbatasan nasional sebagai bagian dari pertahanan kolektif aliansi.

Paska ditolakannya Georgia dalam keanggotaan NATO pada Pertemuan Puncak NATO di Bucharest, Rusia berupaya untuk tetap menghalangi usaha Georgia melalui pertemuan kedua kepala negara pada tanggal 6 Juni 2008, Rusia sebenarnya memperingatkan Georgia untuk tidak bergabung dengan NATO. Begitu juga ketika \juga Georgia tengah melakukan latihan militer bersama dengan AS-NATO, Rusia selalu memberikan kecaman. Tidak hanya berhenti sampai itu saja, Rusia juga sempat menempatkan pasukannya di sepanjang perbatasan Georgia sebagai peringatan jika Georgia ingin masuk dalam keanggotaan NATO.

Dengan adanya konflik separatisme yang terjadi di wilayah Georgia dimana salah satunya yakni Ossetia Selatan yang menginginkan untuk melepaskan diri dari Georgia, memberikan peluang bagi Rusia untuk mendukung wilayah tersebut. Bagi Rusia yang ikut terjun untuk terlibat dalam konflik tersebut justru kembali mengakibatkan terhambatnya Georgia untuk bergabung dalam keanggotaan NATO dan inilah salah satu upaya Rusia guna mempersempit ruang gerak Georgia mengingat NATO tidak akan menerima Georgia sebagai anggotanya jika Georgia masih memiliki permasalahan dalam batas wilayahnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kanselir Jerman, Angela Merkel disela-sela pertemuan dengan Presiden Rusia paska penandatanganan gencatan senjata bahwa Georgia harus menyelesaikan persoalan perbatasan jika ingin masuk dalam

keanggotaan NATO<sup>113</sup>. Pada November 2008 tidak ada konsesus dalam NATO mengenai tawaran Georgia dalam Rencana Aksi Keanggotaan.

Demi mencegah agar supaya Georgia tidak masuk dalam keanggotaan NATO, Seperti yang di jelaskan pada sub A dimana Rusia membangun pangkalan militer di Ossetia Selatan guna melindungi warga nya diwilayah tersebut dari serangan musuh, sebetulnya dengan upaya yang sama dengan adanya pangkalan militer di Ossetia selatan tersebut tentu sebetulnya bukan hanya akan semakin memperluas pengaruh Rusia di wilayah tersebut sekaligus meningkatkan hegemoni Rusia tetapi juga mempermudah militer Rusia untuk melakukan pengawasan di wilayah-wilayah Georgia yang lainnya.

Dengan demikian terwujudlah kepentingan Rusia dalam konflik ini yakni untuk menghalangi Georgia menjadi anggota NATO mengingat Ossetia Selatan mampu melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Sehingga sia-sia saja Georgia melakukan operasi militer ke Ossetia Selatan demi upayanya untuk mempertahankan provinsi separatis tersebut untuk melepaskan diri agar dapat tetap menjadi bagian dari wilayahnya. Namun, jika Georgia akhirnya masuk sebagai anggota NATO, tidak bisa dibayangkan dampaknya di kemudian hari mengingat letak Georgia yang strategis dan berada pada titik pengiriman minyak bumi dari Kaspia dan Asia tengah menuju Eropa dan Amerika Serikat<sup>114</sup>, meski Georgia bukan merupakan negara penghasil minyak.

Jalur pipa yang terbentang sepanjang 1770 km antara Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) yang baru saja diresmikan tahun lalu mampu mengirim sekitar 1 juta barel minyak bumi per hari dari Baku di Azerbaijan menuju Yumurtalik di Turki, sebelum dimasukkan ke

---

Merkel, Medvedev Clash Over Russia's War In Sochi's Talks dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3567243,00.html> diakses pada 29 Desember 2011

Mengapa Amerika Ngotot Membela Georgia dari <http://ferza.net/internasional/mengapa-amerika-ferza.net/08ngotot%20membela-georgia-2.html> diakses Tanggal 14 Oktober 2011

kapal tanker untuk dikirim ke Eropa dan AS. Sekitar 249 km pipa tersebut melewati Georgia, dan hanya 55 km pipa tersebut melewati Ossetia Selatan<sup>115</sup>. Maka dalam konflik Ossetia Selatan ini, Rusia terus melakukan gempuran kepada Georgia sebagai upayanya agar Georgia melakukan peninjauan ulang dalam memasuki keanggotaan NATO.

Selain itu dalam benak Rusia akan muncul dampak lainnya, jika Georgia diterima sebagai anggota NATO maka bakal mengubah negara ini sebagai pangkalan militer anti Rusia di kawasan Kaukasus. Konstelasi kekuatan militer di kawasan Kaukasus dan sekitar Laut Hitam akan berubah dan berbalik mengancam Rusia. Namun sebagian negara Eropa seperti Jerman dan Perancis meyakini keanggotaan Georgia di NATO bakal memunculkan aksi dan reaksi keras Rusia. Jika hal itu terjadi, keseimbangan kekuatan di Eropa juga akan mengalami perubahan yang dahsyat<sup>116</sup>.

Sebelum Rusia terjun untuk melibatkan diri dalam konflik yang terjadi antara pihak separatis Ossetia Selatan dengan Georgia, Rusia sudah mempertimbangkannya secara masak. Hasilnya pun memenuhi target selain kemenangan mutlak yang didapat dalam pertempuran melawan Georgia, dengan lepasnya Ossetia Selatan dari kontrol Georgia membawa provinsi separatis tersebut menjadi negara merdeka serta tertundanya upaya Georgia untuk masuk ke dalam keanggotaan NATO.